

ANALISIS WACANA IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA

Nurul Iswari¹, Meti Ekayani^{2*}, Dodik Ridho Nurrochmat³

¹ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Bogor 16680

² Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Bogor 16680

³ Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor 16680

*Email: meti@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya mencapai pembangunan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS). Kemunculan narasi kebijakan PS mulai meluas sejak ditetapkannya Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui narasi dalam media ilmiah dan media massa berkaitan dengan kebijakan PS dan sekaligus menduga bahwa pelaksanaan PS menemukan berbagai hambatan. Sebagian besar pernyataan (*statements*) dalam artikel yang membahas tentang pelaksanaan PS merupakan artikel dalam media ilmiah, yaitu 308 pernyataan dari 82 artikel media ilmiah. Sedangkan dalam media massa diperoleh 41 pernyataan dalam 32 artikel yang membahas implementasi PS. Media ilmiah menilai bahwa kesuksesan pelaksanaan PS dapat terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hal ini memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam program PS. Para informan juga menilai bahwa dengan peningkatan pendapatan melalui program PS turut memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, seperti peningkatan taraf pendidikan. Persepsi ini sejalan dengan narasi dalam media massa yang menilai bahwa PS memiliki dampak paling besar terhadap kualitas hidup masyarakat secara nonekonomi. Di sisi lain, pengaruh pelaksanaan PS terhadap perubahan sikap masyarakat dinilai positif oleh media ilmiah. Masyarakat memperoleh kepercayaan diri dalam mengelola kawasan hutan jika pemerintah memberikan izin akses.

Kata kunci: Analisis isi, masyarakat, media, perhutanan sosial

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION PLAN FOR SOCIAL FORESTRY PROGRAM IN INDONESIA

ABSTRACT

The Indonesian government is committed to sustainable forest development and community welfare through the Social Forestry (SF) program. The emergence of the SF policy narrative has spread since the enactment of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 83 of 2016 concerning Social Forestry. This study was conducted to determine the narrative in scientific media and mass media related to the SF policy, and at the same time, to investigate whether the implementation of SF encountered various obstacles. Most of the statements in articles discussing SF's implementation are in scientific media, namely 308 statements from 82 scientific media articles. Meanwhile, in the mass media, 41 statements were made in 32 articles discussing the implementation of SF. Scientific media suggest that the success of SF implementation can be attributed to increased community income, which motivates the community to participate in the SF program. Informants also assessed that increasing income through the SF program improves the quality of community life, including higher education levels. This perception aligns with the narrative in the mass media, which assesses that SF has the most significant impact on the quality of community life in non-economic terms. On the other hand, the scientific media assesses the influence of SF implementation on changes in community attitudes positively. Communities gain confidence in managing forest areas if the government grants access permits.

Keywords: Content analysis, communities, media, social forestry

PERNYATAAN KUNCI

- Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) yang masih baru dalam pengelolaan kehutanan perlu melihat apa saja yang dapat menghambat implementasinya. Maka dari itu, diskursus media berguna dalam menggambarkan pelaksanaan PS di Indonesia.
- Pemilihan media ilmiah dilakukan untuk melihat bagaimana relevansinya dengan diskursus dalam media massa. Keseriusan ilmuwan dalam mengawal kebijakan PS terlihat dari dominasinya dalam ruang yang terjadi di media melalui berbagai pernyataan pro dan kontra.
- Keberhasilan dan keberlanjutan program PS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Media menilai bahwa aksesibilitas menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan PS. Sementara *stakeholder* menganggap bahwa pendapatan masyarakat sebagai faktor yang paling memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan PS.
- Pengaruh pelaksanaan PS terhadap perubahan sikap masyarakat dinilai positif oleh media ilmiah. Masyarakat memperoleh kepercayaan dalam mengelola kawasan hutan jika pemerintah memberikan izin akses. Berdasarkan perspektif media ilmiah, aspek sumber daya merupakan aspek yang paling mendukung dan sekaligus menghambat pelaksanaan PS. Sementara media massa menilai disposisi yang paling mendukung pelaksanaan PS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan program PS ditujukan sebagai resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Beberapa dekade lalu, pengelolaan hutan cenderung bersifat *open access* dimana masyarakat bisa merambah hutan, menimbulkan dikotomi akses kelola hutan, hingga terjadi konflik okupasi. Dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program PS sebaiknya memusatkan masyarakat sebagai aktor utama pelaksana program. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya sebatas pemberian hak kelola, namun juga peningkatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan pendampingan.

Masyarakat memerlukan pendampingan yang melibatkan kolaborasi multipihak untuk melengkapi pengetahuan lokal yang telah mereka

miliki. Hal ini selaras dengan pendapat Lubis *et al.* (2023) bahwa dalam pengembangan usaha di sektor kehutanan memerlukan kolaborasi dari berbagai macam *stakeholder*.

Jika pemerintah dapat memberdayakan masyarakat desa yang tinggal di dalam kawasan hutan, maka secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberian hak kelola kawasan hutan dan sumber daya alam kepada masyarakat dilakukan agar masyarakat dapat menerima manfaat untuk kebutuhan sendiri maupun menambah penghasilan (Paramita *et al.* 2017).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang ditopang dari ekstraksi sumber daya alam menimbulkan beragam masalah baru, yaitu perubahan kualitas lingkungan (Ramadhan 2023) dan kesenjangan pendapatan masyarakat meskipun pengentasan kemiskinan dilakukan dan pertumbuhan ekonomi negara menguat. Kejadian kemiskinan tertinggi ditemukan dalam wilayah paling terpencil dan berada di dalam atau sekitar kawasan hutan (Sunderlin *et al.* dalam Shepherd *et al.* 2020). Di Indonesia, sekitar 18 ribu desa berlokasi di tepi kawasan hutan dan 2.768 desa berada di dalam kawasan hutan (BPS 2019). Kehidupan masyarakat desa yang sangat bergantung pada sumberdaya alam dan hutan (*forest dependent people*) menghadapi masalah kemiskinan kronis (CPRC 2011) dan menimbulkan efek domino, seperti rusaknya hutan karena deforestasi dan degradasi lahan, kualitas kesehatan yang memburuk, taraf pendidikan yang menurun, dan munculnya konflik sosial. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang menghilangkan sumber penghasilan masyarakat dari sektor kehutanan dalam penelitian Shepherd *et al.* (2020) terbukti dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Esensi hutan bagi kelangsungan hidup manusia diangkat dalam Kongres Kehutanan Sedunia tahun 1978 yang menekankan pentingnya hutan untuk rakyat. Sebelumnya pengelolaan hutan cenderung bersifat sentralistik dan dianggap gagal dalam menyejahterakan masyarakat yang ditandai dengan kemiskinan di keluarga petani yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (Kaskoyo *et al.* dalam Rachmawan *et al.* 2021). Deklarasi hutan untuk rakyat di tingkat global menunjukkan bahwa pengelolaan hutan beralih menjadi pro masyarakat dan khususnya di Asia, pendekatan ini sekaligus mempromosikan

tata kelola hutan yang berkelanjutan (Guerra *et al.* dalam Reyes *et al.* 2024). Visi hutan untuk rakyat menjadi refleksi bagi kebijakan kehutanan di Indonesia yang ditandai dengan transformasi pendekatan *bottom-up* dalam kewenangan pengelolaan hutan. Meminjam studi Li *et al.* dalam Reyes *et al.* (2024), inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat di negara Indonesia, Filipina, dan Thailand dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekologi hutan. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan semakin terlihat sejak pemerintah mengimplementasikan model baru pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kebijakan ini menjadi salah satu basis konsep perhutanan sosial yang akhirnya disempurnakan dalam PermenLHK No P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Skema utama program PS terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Gema perhutanan sosial terus meluas seiring dengan pencanangan Proyek Strategis Nasional di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dengan target distribusi izin sebesar 12,7 juta ha di akhir tahun 2024. Kebijakan program perhutanan sosial yang bersifat multisektoral mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai keberhasilan program sekaligus tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Ma *et al.* (2022), praktik pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi tanggung jawab kolektif. Keberhasilan program perhutanan sosial tidak lepas dari keterlibatan multipihak, dalam hal ini kolaborasi *pentabelix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media. Setiap pemangku kepentingan memiliki perannya masing-masing dimana media berperan menyajikan berita yang dapat membentuk diskursus dalam opini publik. Sementara akademisi dapat memberikan solusi kebijakan melalui rangkaian analisis masalah kebijakan. Pengetahuan akademis perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Connelly *et al.* 2021) dan menjembatani antara kepentingan

akademik dan politik dalam mengadvokasi kebijakan (Bachtar 2011).

Dalam konteks kebijakan kehutanan, peran media dalam membentuk opini publik tidak selalu positif, biasanya karena keakuratan dan tendensi pemberitaan sehingga mengubah pola pandangan pembaca (Apriliani *et al.* 2022; Saputri *et al.* 2025). Pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selaras dengan capaian keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui analisis wacana, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi narasi yang muncul dalam media berkaitan dengan keberhasilan implementasi program PS dan bagaimana peran para aktor dalam diskursus tersebut.

SITUASI TERKINI

Berdasarkan laporan data terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui sistem informasi *online* Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), capaian distribusi akses kelola hutan dan lahan PS sebesar 8.300.116 ha dengan target capaian seluas 12,7 juta ha. Sebanyak 1,4 juta penerima surat keputusan PS dengan proporsi 54,65% merupakan penerima laki-laki dan hanya 11,90% penerima perempuan serta sisanya tidak diketahui. Surat keputusan PS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 11.015 surat yang terdiri dari 3.274 SK HKm, 2.834 SK HTR, 1.969 SK HD, 1.095 SK KK, dan 131 SK HA. Berdasarkan statistik nilai ekonomi, di tahun 2024 sebanyak hampir 2 triliun rupiah nilai transaksi ekonomi dari KUPS.

Perkembangan program PS di Indonesia memiliki keragaman dimana khusus di Pulau Jawa sebagian besar implementasi PS terjadi di kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani (Ragandhi 2021). Terminologi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) berubah menjadi Kulin-KK (Kemitraan Kehutanan) dan pada tahun 2017 telah dikeluarkannya skema PS berupa IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Mandat program PS yang dituangkan dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ditujukan sebagai upaya mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Meminjam hasil penelitian terdahulu, program PS terbukti memberikan dampak positif diantaranya peningkatan kemandirian desa dalam membangun wilayahnya, peningkatan peluang usaha (Iman dan Arifin 2024; Permatasari *et al.* 2020; Sa'diyah dan Soetarto 2020), peningkatan kesejahteraan (Farid

et al. 2022; Sari *et al.* 2019), peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan (Situmorang dan Noviana 2022; Aletrino *et al.* 2021; Martapani *et al.* 2021), pengurangan kejadian penjarahan hutan (Situmorang dan Noviana 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pengumpulan data dan kualitatif melalui analisis konten terhadap artikel ilmiah dan pemberitaan media masa *online*, yang berkaitan dengan implementasi PS, periode tahun 2016-2022. Kemudian hasil analisis konten dikonfirmasi kepada multipihak (*key person*) terkait melalui wawancara mendalam.

Pengumpulan Data Dan Analisis

1. Pemilihan artikel

Penelusuran artikel dalam media ilmiah dilakukan dengan menggunakan *Google Scholar* dengan batasan hanya jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional terindeks Scopus. Sementara itu artikel dalam media massa diperoleh dari laman berita daring Tribunnews dan Jawa Pos. Pemilihan kedua media massa ini tidak hanya karena heterogenitas data (penulis dan pembicara dalam artikel), namun juga Tribunnews sebagai afiliasi media nasional Kompas dengan jaringan surat kabar yang luas di beberapa kota besar di Indonesia dan Jawa Pos yang juga memiliki jaringan media massa terbesar dengan kurang lebih 210 grup media (Lenggawa 2019).

Dalam mencari artikel yang relevan dengan pelaksanaan PS sekaligus mengindeks konten spesifik, penulis menggunakan kata kunci (Tabel 1) untuk memisahkan artikel yang membahas pelaksanaan PS dengan artikel yang tidak membahasnya. Setiap pencarian artikel yang dilakukan, penulis turut meninjau judul dan isi artikel untuk menilai relevansinya dengan konteks analisis yang akan dilakukan.

2. Membuat kerangka kerja analisis (*framing*)

Tujuan dilakukannya *framing* adalah mendapatkan fokus dan kesesuaian antara kerangka analisis dengan tujuan yang ingin dicapai (Nurrochmat *et al.* 2016). Terdapat tiga aspek kunci yang dipilih untuk *framing* dalam penelitian ini, yaitu frekuensi artikel tentang pelaksanaan PS di Indonesia yang dimuat dalam media ilmiah dan media massa dalam kurun waktu tahun 2016-2022, faktor pendukung, dan faktor keberhasilan pelaksanaan program PS di Indonesia.

Tabel 1. Kata kunci penelusuran dokumen

No.	Kata kunci
1	Perhutanan sosial, hutan sosial, kehutanan sosial, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pengelolaan hutan masyarakat, Indonesia
2	<i>Social forestry, community forest, customary forest, traditional forest, forest partnership, community forest management, community-based forestry</i> , Indonesia

Analisis Isi (Analisis Konten)

Salah satu alat yang digunakan dalam penelitian analisis diskursus adalah analisis isi. Analisis isi adalah suatu metode untuk mengkaji makna atau konteks dari suatu pesan, teks, dan komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif (Holsti 1969 dalam Fabra-Crespo dan Rojas-Briales 2015). Tahapan utama dalam melakukan analisis isi terdiri dari mengembangkan sistem kategori dan melakukan pengkodean (*coding*).

1. Pengembangan sistem kategori

Menurut Holsti (1969), syarat utama dalam membuat sistem kategori untuk analisis isi adalah (1) kategori harus merepresentasikan pertanyaan penelitian; (2) kategori harus lengkap; (3) kategori bersifat eksklusif, yaitu tidak terdapat data dalam isi teks yang dapat ditempatkan pada lebih dari satu sel; (4) kategori bersifat independen, yaitu setiap data dalam kategori tidak mempengaruhi klasifikasi data lainnya; dan (5) setiap kategori harus berasal dari klasifikasi tunggal dan dalam penelitian ini apabila tidak terdapat data yang tidak masuk dalam kategori, maka penulis memasukkannya sebagai *not recognizable* (tidak dapat dikenali).

Sejalan dengan prinsip analisis isi yang merupakan kegiatan mewawancarai teks, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi hasil pengumpulan artikel berdasarkan kategori masing-masing. Tabel 2 memperlihatkan aspek-aspek yang tercakup dalam sistem kategori penelitian ini.

2. *Coding*

Ekayani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bagian sentral dalam desain penelitian diskursus adalah *coding* yang mengintegrasikan data, teori, dan pertanyaan penelitian. Dari sistem kategori yang telah disusun

sebelumnya, kemudian diperhalus dalam buku pengkodean (*coding book*). Hasil *coding* ditabulasi silang dan diinterpretasikan dengan analisis deskriptif.

Tabel 2. Sistem kategori

Unit Analisis	Kategori	Sub-kategori
Artikel	Informasi umum	Coder
		Nomor artikel
		Penulis
		Tahun terbit
		Judul artikel
Pernyataan	Pelaksanaan	Sumber publikasi
		Provinsi
		Skema PS
		Valensi
	Faktor pendukung	Komunikasi
		Sumberdaya
		Disposisi
		Struktur birokrasi
		Lingkungan kebijakan
	Faktor penghambat	Tingkah laku aktor
		Kemitraan
		Lokasi lahan
		Faktor keberhasilan dan keberlanjutan
		Isu keberlanjutan

3. Wawancara informan kunci (*key person*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan reliabilitas hasil *coding* dengan cara mengonfirmasi hasil analisis konten kepada informan kunci multipihak terkait isu riset. Tabel 3 menyajikan daftar individu/kelompok informan kunci yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan mengadopsi penelitian Ekayani *et al.* (2015), yaitu bersifat semi terstruktur mengonfirmasi apakah hasil analisis isi menggambarkan kondisi realitas, dari perspektif para pihak terkait tersebut. Penetapan jumlah informan kunci dilakukan secara *purposive sampling* mewakili setiap unsur *Pentahelix* (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, dan pemerintah) dengan menambahkan pihak dari unsur organisasi nonpemerintah (NGO) dalam implementasi PS.

Tabel 3. Daftar informan kunci (*key person*)

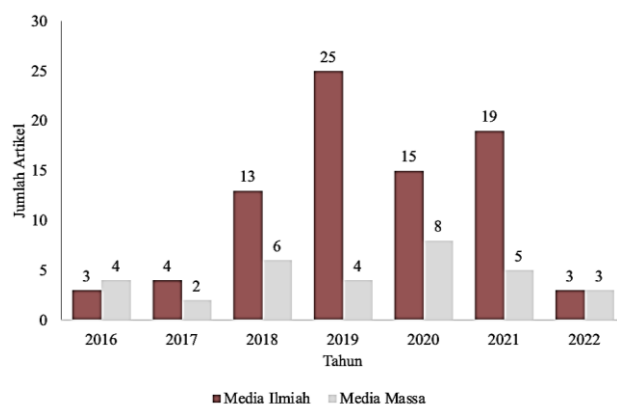
No.	Asal Instansi
1	Tenaga pengajar Universitas Tanjungpura
2	Peneliti BRIN
3	Widyaswara KLHK
4	Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
5	Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia
6	<i>Regulatory Affairs Manager</i> , Asia Pulp & Paper
7	Kepala Seksi Utama Kemitraan Produktif Perhutani
8	Anggota LPHD Sungai Bemban
9	Anggota LPHD Medan Mas
10	Anggota LMDH Rawa Sakti
11	Anggota LMDH Pesona Alam Lestari
12	Masyarakat penerima SK Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi
13	Kepala Bidang Bina Usaha dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
14	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
15	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
16	Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network
17	Pimpinan Redaksi Forest Digest
18	Direktur Rimba Collective, Lestari Capital
19	Kepala Bidang Penguatan dan Standarisasi Organisasi, Hutan Kita Institute (HaKI)

Analisis diskursus

Analisis wacana media merupakan bagian dari analisis diskursus kritis (*critical discourse analysis*). Studi diskursus media pertama kali diperkenalkan oleh Fowler *et al.* dalam van Dijk (2015), bahwa representasi dan asumsi dapat berubah sesuai dengan struktur kalimat yang disampaikan dalam media. Menyadur dari tulisan van Dijk (2015), bahwa telah banyak kajian media yang dilakukan dalam mempelajari isu sosial dan politik. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk melakukan analisis wacana dalam media ilmiah dan media massa berkaitan dengan pelaksanaan PS di Indonesia. Analisis wacana yang dilakukan mengacu pada teori van Dijk dalam Ekayani (2011), bahwa dimensi yang beragam dalam suatu teks memerlukan studi diskursus dalam struktur teks untuk memahami atau menentukan tema tertentu yang dibicarakan dalam teks tersebut.

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Penulis menemukan sebanyak 114 artikel yang relevan dengan topik implementasi PS, terbagi menjadi 82 artikel dari media ilmiah dan 32 artikel dari media massa. Skema PS yang paling banyak didiskusikan dalam media adalah hutan kemasyarakatan (HKm), yaitu sebanyak 47 dari total artikel. Sedangkan hanya 13 artikel yang membahas implementasi PS dalam hutan tanaman rakyat (HTR). Sementara itu frekuensi artikel yang berkaitan dengan PS dalam media mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2016 hingga 2022 (Gambar 1). Sebanyak 29 artikel terbit pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Sedangkan pada tahun 2022, penulis hanya menemukan 6 artikel relevan yang membahas pelaksanaan PS di Indonesia. Dalam RPJMN tahun 2015-2019, peningkatan akses kelola hutan menjadi salah satu fokus pemerintah dimana dari target 12,7 juta ha, baru terealisasi sebesar 2,6 juta ha pada tahun 2019. Sebagian aktor dalam media menilai bahwa pada dasarnya kebijakan PS bertujuan baik bagi kepentingan masyarakat, namun perlu mempertimbangkan kesiapan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari persiapan hingga pasca izin.



Gambar 1. Jumlah artikel implementasi PS dalam media pada tahun 2016-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa peran saintis dalam diskursus PS di media ilmiah lebih mewarnai dibandingkan media massa. Kontribusi saintis menurut Nurrochmat *et al.* (2016) dalam menyediakan opsi kebijakan adalah melalui peran positif dalam pembuatan kebijakan, dimana dalam analisis penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh saintis untuk perumusan dan hasil kebijakan yang lebih baik (Ekayani *et al.* 2015). Rekomendasi yang paling banyak disampaikan oleh saintis adalah berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan memer-

hatikan prinsip *good governance* dalam implementasi PS. Narasi yang muncul dalam media massa mengatakan bahwa masyarakat penerima SK turut merasakan manfaat dari dilaksanakannya PS, seperti kemudahan pengajuan bantuan dan kepastian hukum bagi para petani.

Krumland (2004) mengklasifikasikan kegiatan dalam sektor kehutanan ke dalam tiga kelompok, yaitu positif, negatif, dan ambivalen. Sebuah narasi media dapat bervalensi positif apabila orientasi pemberitaan yang positif, seperti PS dapat memberi manfaat bagi masyarakat dengan peningkatan kualitas SDM, sinergi antar *stakeholder*, dan sebagainya. Valensi dikatakan negatif apabila orientasi penulis ke arah sebaliknya, seperti PS berdampak pada kesenjangan sosial, kemiskinan, deforestasi, konflik, dsb. Sementara itu ambivalensi adalah narasi yang memiliki kedua orientasi (positif dan negatif). Dalam penelitian ini, artikel yang tidak diketahui orientasinya dimasukkan ke dalam kategori NR (*not recognizable*). Merujuk pada Tabel 4, hampir 60% dari total artikel memberikan orientasi positif dalam diskursus PS. Sebagian besar aktor dan/atau *speakers* memiliki persepsi bahwa PS melibatkan partisipasi aktif masyarakat, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dan berdampak pada perbaikan tata air di sekitar hutan. Valensi negatif yang muncul berkaitan dengan lemahnya kelembagaan dan rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PS. Sementara *key person* berpandangan bahwa tujuan program PS sudah baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan dan hambatan.

Tabel 4. Valensi implementasi program PS

Valensi	Sumber Data					
	MI		MM		KP	
	n	%	n	%	n	%
Positif	40	48,78	28	87,50	7	36,84
Negatif	14	17,07	1	3,13	1	5,26
Ambivalen	28	34,15	3	9,37	11	57,89
NR	0	0	0	0	0	0
Jumlah (N)	82	100,00	32	100,00	19	100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa;

KP = *key person*

Hasil analisis isi dan wawancara juga menemukan bahwa terdapat pro kontra pelaksanaan PS di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan desentralisasi. Program PS yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun bersamaan dengan desentralisasi ternyata tidak memberikan perubahan signifikan dalam pengelolaan hutan di pulau Jawa. Desentralisasi hanya dirasakan dan

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di luar Jawa, namun tidak bagi pemerintah daerah di pulau Jawa karena peraturan yang berlapis mengenai siapa yang berhak mengatur tata kelola hutan di Pulau Jawa (Ragandhi 2021).

Berkaitan dengan pelaksanaan PS yang dinilai kontradiktif oleh sebagian aktor (penulis dan pembicara) dalam media, pada hakikatnya tujuan kebijakan yang baik tidak selalu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan. Penyebabnya adalah kesalahan berasumsi dan perspektif dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan bias (Nurrochmat *et al.* 2016). Kesalahan ini dapat terjadi apabila informasi tidak disampaikan secara tepat dan peraturan yang dijalankan tidak selaras. Wulandari *et al.* (2016) berpandangan bahwa pentingnya memfasilitasi dan menindaklanjuti sebuah perdebatan (diskursus) agar dapat mencapai pemahaman bersama tentang makna dan implikasi dari kebijakan. Harapannya adalah menghindari kegagalan kebijakan yang dapat berdampak di masa mendatang. Penilaian faktor penghambat pelaksanaan PS mengadopsi model implementasi kebijakan Edwards III (1980), Mazmanian dan Sabatier (1983), dan Goggin *et al.* (1990) dengan beberapa modifikasi penulis yang

menemukan beberapa pernyataan (*statement*) dalam media terkait kegagalan pelaksanaan PS di Indonesia.

Penelitian ini menemukan sebanyak 15 faktor yang menghambat pelaksanaan PS (Tabel 5). Faktor-faktor tersebut adalah isi kebijakan, informasi, dukungan, struktur birokrasi, peraturan yang tidak sinkron, perilaku aktor, sumber daya, sikap komunal, kelembagaan, masalah teknis, akses lokasi, rendahnya kapasitas masyarakat, tidak ada pendampingan, ketidaksesuaian hasil, dan kurangnya pengawasan. Wacana faktor penghambat PS yang dinilai paling penting oleh media ilmiah adalah faktor sumber daya. Sementara masalah teknis dianggap tidak terlalu penting dalam menghambat pelaksanaan program. Media massa menilai bahwa kapasitas masyarakat yang rendah menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan PS dan sebaliknya tidak ditemukan faktor penghambat berupa informasi, masalah teknis, akses lokasi, dan kurangnya pengawasan dalam diskursus. Sebagian besar *key person* menilai bahwa nihilnya pendampingan masyarakat dalam kegiatan PS menjadi faktor yang paling menghambat pelaksanaan. Sedangkan akses lokasi dianggap tidak terlalu menghambat pelaksanaan PS.

Tabel 5. Faktor Penghambat Pelaksanaan PS

Faktor Penghambat	Sumber Data					
	MI		MM		KP	
	n	%	n	%	n	%
Isi kebijakan	13	3,65	2	8,33	4	2,92
Informasi	18	5,06	0	0,00	13	9,49
Dukungan	22	6,18	2	8,33	14	10,22
Struktur birokrasi	34	9,55	3	12,50	11	8,03
Peraturan tidak sinkron	12	3,37	2	8,33	13	9,49
Perilaku aktor	22	6,18	1	4,17	5	3,65
Sumber daya	44	12,36	3	12,50	15	10,95
Sikap komunal	32	8,99	1	4,17	1	0,73
Kelembagaan	31	8,71	1	4,17	4	2,92
Masalah teknis	6	1,69	0	0,00	7	5,11
Akses lokasi	14	3,93	0	0,00	3	2,19
Rendahnya kapasitas	43	12,08	4	16,67	14	10,22
Tidak ada pendampingan	26	7,30	3	12,50	18	13,14
Ketidaksesuaian hasil	20	5,62	2	8,33	8	5,84
Kurangnya pengawasan	19	5,34	0	0,00	7	5,10
Jumlah (N)	356	100,00	24	100,00	137	100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa; KP = *key person*

Berkaitan dengan praktik perumusan dan implementasi kebijakan, Nurrochmat *et al.* (2016)

berpandangan bahwa instrumen informasi sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan

kebijakan kehutanan, sumber daya alam, dan lingkungan. Dalam menilai faktor pendukung keberhasilan implementasi PS, penelitian ini menggunakan variabel yang memodifikasi dari beberapa model implementasi kebijakan George C. Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, dan Malcolm L. Goggin. Teori Mazmanian dan Sabatier memaknai implementasi kebijakan dengan memahami perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan (Pramono 2020). Sementara itu teori Edwards III dalam Kasmad (2013) mengartikan implementasi kebijakan sebagai tahap pembuatan kebijakan di antara penetapan suatu kebijakan dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan bagi masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan PS merujuk pada model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan sumber daya (Kasmad 2013).

Penelitian ini juga menambahkan variabel faktor pendukung keberhasilan dari teori Mazmanian dan Sabatier dimana lingkungan kebijakan dapat memengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan dengan menilai kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Malcolm L. Goggin dalam Kasmad (2013) menemukan bahwa perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan menentukan keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut. Tabel 6 menyajikan distribusi data dari masing-masing faktor pendukung implementasi program PS menurut perspektif media dan *stakeholder*. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam perspektif media ilmiah dan *stakeholder*, aspek sumberdaya paling berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan PS. Media massa menilai bahwa disposisi yang baik menjadi faktor yang paling mendukung pelaksanaan PS.

Merujuk pada teori Edwards III (Kasmad 2013), sumber daya dan disposisi merupakan faktor yang memberikan dampak langsung terhadap implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, wewenang, infrastruktur, dan sebagainya. Disposisi menyangkut bagaimana komitmen dan respons aktor pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aktor pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan tersebut akan dijalankan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya. Komitmen terhadap disposisi tersebut

diharapkan menjadi efek yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan (Handityasa dan Purnaweni 2017). Sebagian besar *stakeholder* yang diwawancarai juga berpendapat bahwa aspek sumber daya seperti bantuan, baik teknis maupun non teknis dan mekanisme pembiayaan yang diberikan kepada pelaksana PS sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Tabel 6. Faktor Pendukung Pelaksanaan PS

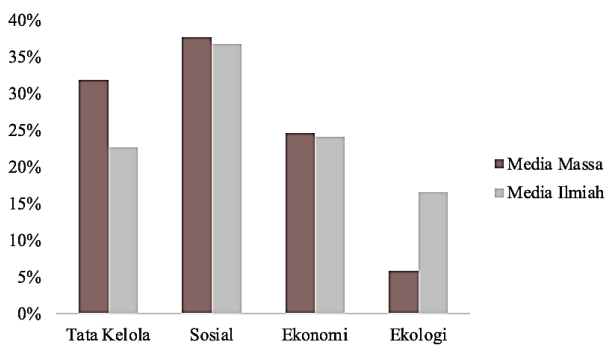
Faktor Pendukung	Sumber Data					
	MI		MM		KP	
	n	%	n	%	n	%
Komunikasi	21	6,10	10	6,29	8	9,41
Sumber daya	58	16,86	26	16,35	16	18,82
Disposisi	39	11,34	28	17,61	10	11,76
Struktur birokrasi	41	11,92	24	15,09	9	10,59
Lingkungan kebijakan	45	13,08	26	16,35	9	10,59
Perilaku aktor	56	16,28	11	6,92	7	8,24
Kemitraan	35	10,17	18	11,32	15	17,65
Lokasi lahan	49	14,24	16	10,06	11	12,94
Jumlah (N)	344	100,00	159	100,00	85	100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa;
KP = *key person*.

Dalam analisis isi yang dilakukan, penulis juga menilai pandangan para aktor terhadap isu keberlanjutan pelaksanaan PS di Indonesia. Variabel isu yang dinilai terdiri dari empat pilar keberlanjutan yang merujuk pada Pau *et al.* (2022), dimensi keberlanjutan terdiri dari unsur ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan efektif. Tata kelola (*governance*) adalah seluruh rangkaian proses pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (Tahir 2019). Hasil analisis menemukan bahwa isu sosial yang paling banyak menarik perhatian media ilmiah dan media massa dalam diskursus pelaksanaan PS. Sebaliknya isu ekologi yang paling sedikit dibicarakan dalam wacana kedua media (Gambar 2). Baik media ilmiah maupun media massa, sama-sama memaknai pelaksanaan PS sebagai sebuah kebijakan yang sangat berimplikasi terhadap aspek sosial kualitas hidup masyarakat sebagai aktor utama dalam program ini.

Penelitian ini juga menganalisis faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan PS di Indonesia. Dalam proses analisis isi yang dilakukan, penulis menemukan sebanyak 34 faktor keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan PS. Narasi yang dimunculkan dalam media

berfokus pada kelompok aktor masyarakat pemegang izin sebagai pelaksana dan pengelola aktivitas dalam program PS. Penulis kemudian mengelompokkan faktor keberhasilan dan keberlanjutan PS ke dalam 7 kategori yang terdiri dari akses masyarakat, kapasitas teknis, kapasitas berjejaring, karakteristik petani, pendapatan masyarakat, kepastian hak atas lahan, dan kontribusi kepada pemerintah untuk media ilmiah. Namun penulis menemukan perbedaan dalam perdebatan di kedua media, dimana media massa menarasikan keberhasilan dan keberlanjutan PS karena program ini menjadi prioritas pemerintah. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pelaksanaan program PS dan perencanaan pembangunan.



Gambar 2. Isu keberlanjutan dalam diskursus implementasi PS

Ribot dan Peluso dalam Budi (2020) mengatakan bahwa akses merupakan suatu hal yang serupa atau yang berhubungan dengan kekuatan (*power*). Akses juga dinilai sebagai perwujudan dari kapasitas untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (objek materi, orang, lembaga, dan simbol) dan dalam hal ini merupakan manfaat yang ingin dicapai oleh masyarakat pemegang izin kebijakan program perhutanan sosial. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, *power* diwujudkan dan dijalankan melalui beragam mekanisme, proses, dan hubungan sosial sehingga memengaruhi kemampuan orang-orang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam.

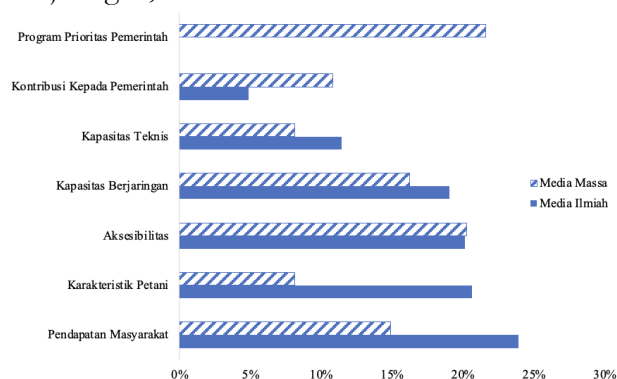
Dalam penelitian ini, akses terhadap sumber daya hutan dan lahan, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, akses terhadap faktor produksi, kegiatan pengembangan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, serta rasa aman atau kepastian hak atas lahan dimasukkan ke dalam variabel akses masyarakat. Meminjam penelitian Budi (2020) yang meneliti kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan

pada situasi masyarakat yang kehidupannya di dalam dan di luar kawasan hutan, kapasitas masyarakat terdiri dari kapasitas teknis, kapasitas berjejaring, dan kapasitas kultural. Kapasitas teknis mencakup kemampuan teknis masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kapasitas teknis menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat pada kondisi spesifik lokal (Budi 2020). Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam kapasitas teknis adalah pola tanam, luas garapan, kondisi hutan dan tegakan, areal kelola kelompok, program kerja kelompok, perubahan luas lahan, pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT), kemampuan menyediakan pupuk, ketersediaan air irigasi, penggunaan teknologi pertanian, dan jenis komoditi yang dikelola. Sementara itu kapasitas berjejaring adalah kapasitas masyarakat dalam berinteraksi, bekerja sama, maupun bernegosiasi terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kapasitas berjejaring didekati dari bentuk kesepakatan/lembaga/aturan main yang bersifat formal atau informasi serta antar anggota masyarakat dan dengan pihak luar (Budi 2020).

Penelitian ini memasukkan modal sosial dan/atau tertib sosial, hubungan masyarakat dengan pemerintah/pihak lain, kelembagaan pengelolaan hutan lestari, kemandirian kelembagaan petani, dan kelembagaan kelompok sebagai kapasitas berjejaring. Keberadaan modal sosial sebagai aset penghidupan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, partisipasi anggota kelompok, dan jaringan sosial (Hamzah *et al.* 2016; Ibisono dan Kartodihardjo 2019; Nurysyifa dan Kaswanto 2021; Inama *et al.* 2024). Sementara itu kapasitas kultural tidak dimasukkan sebagai variabel analisis faktor pendukung keberlanjutan implementasi program PS karena dari keseluruhan jumlah artikel media ilmiah dan media massa yang telah dianalisis penulis tidak menemukan pernyataan spesifik yang berkaitan dengan kapasitas kultural. Budi dan Mardiana (2022) berpendapat bahwa nilai-nilai kultural yang dibangun dan diterapkan oleh masyarakat dapat menghasilkan suatu kapasitas dalam mengelola sumber daya di kawasan hutan secara berkelanjutan. Kapasitas kultural adalah kemampuan masyarakat dalam membangun dan menerapkan nilai budaya untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan agar keberadaan dan fungsinya berkelanjutan. Variabel

karakteristik petani terdiri dari motivasi masyarakat, partisipasi petani, pendidikan formal petani dan keluarga, dan pengambilan keputusan. Pendapatan masyarakat mencakup jenis pemberdayaan dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

Narasi mengenai pentingnya akses masyarakat dalam pelaksanaan PS merupakan yang paling banyak dibicarakan dalam media. Gambar 3 menampilkan sebanyak tujuh faktor keberhasilan dan keberlanjutan PS menurut pandangan media dan *stakeholder*. Secara berurutan (dari yang paling sedikit dinarasikan hingga paling banyak dinarasikan), faktor-faktor keberhasilan dan keberlanjutan implementasi PS dalam media ilmiah adalah PS memberikan kontribusi kepada pemerintah, pendapatan masyarakat, karakteristik petani, kapasitas berjejaringan, kapasitas teknis, dan aksesibilitas. Sementara dalam media massa, faktor keberhasilan dan keberlanjutan dari yang paling sedikit dinarasikan hingga paling banyak dinarasikan adalah PS berkontribusi kepada pemerintah, PS sebagai program prioritas pemerintah, karakteristik petani, pendapatan masyarakat, kapasitas teknis, kapasitas berjejaringan, dan aksesibilitas.



Gambar 3. Faktor keberhasilan dan keberlanjutan dalam implementasi PS

Penulis menemukan bahwa dalam media ilmiah tidak terdapat narasi mengenai PS sebagai program prioritas pemerintah dalam mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan PS. Perdebatan lain yang muncul adalah seluruh *key person* menilai bahwa aksesibilitas bukan menjadi faktor penting keberhasilan dan keberlanjutan PS, melainkan adalah faktor pendapatan masyarakat. Mengingat bahwa tujuan pengelolaan hutan sosial untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan menjaga kelestarian hutan, pendapatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan perhutanan sosial. Pendapatan, pendidikan, usia,

dan pengalaman usaha tani memengaruhi motivasi masyarakat dalam mengelola hutan dan sumber daya (Nurdina *et al.* 2015).

Motivasi dan keterlibatan masyarakat berimplikasi terhadap keberlanjutan pelaksanaan suatu kebijakan. Masyarakat juga sangat bergantung sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga hasil penggunaan lahan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu, kebijakan perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas pemerintah merupakan narasi yang paling banyak diwacanakan dalam media massa dan narasi ini tidak ditemukan dalam media ilmiah. Secara berurutan (dari yang paling banyak memengaruhi hingga tidak banyak memengaruhi), faktor-faktor keberlanjutan implementasi program perhutanan sosial dalam media massa adalah program prioritas pemerintah, aksesibilitas, kapasitas berjejaringan, pendapatan masyarakat, kontribusi kepada pemerintah, kapasitas teknis, dan karakteristik petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aletrino A, Mahdi M, Sari R. 2021. Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture* 3(1): 276-285.
- Apriliani NAD, Chairudin M, Hariyanti S, Ramadhanti EP, Aprilian MA, Fauzan MN, Santoso G. 2022. Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jupetra* 1(2):156-164. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.325>.
- Bachtar PP. 2011. Menghasilkan bukti sebagai informasi bagi proses penyusunan kebijakan di Indonesia: tantangan pada sisi penawaran. SMERU. Rubrik Buletin. [diakses 2024 Agu 15]. <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news32.pdf>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019. [diakses 2024 Des 8]. <https://web-api.bps.go.id/download>.
- Budi. 2020. Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Skema HKm dan HTR: Tinjauan Kapasitas dan Akses Masyarakat. Disertasi.

- Departemen Manajemen Kehutanan. IPB University. Bogor.
- Connelly S, Vanderhoven D, Rutherford R, Richardson L, Matthews P. 2021. Translating Research for Policy: The Importance of Equivalence, Function, and Loyalty. *Humanit Soc Sci Commun* 8(191). <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00873-z>.
- [CPRC] The Chronic Poverty Research Center. 2011. Tackling Chronic Poverty: The Policy Implications of Research on Chronic Poverty and Poverty Dynamics. CPRC. Manchester.
- Edwards III GC. 1980. Implementing Public Policy. CQ Press. University of Michigan.
- Ekayani M. 2011. Comparison of Discourses in Global and Indonesian Media and Stakeholders' Perspectives on Forest Fire. Cuvillier Verlag. Göttingen.
- Ekayani M, Nurrochmat DR, Darusman D. 2015. The Role of Scientists in Forest Fire Media Discourse and Its Potential Influence for Policy-Agenda Setting in Indonesia. *Forest and Policy* 68: 22-29. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.01.001>.
- Fabra-Crespo M, Rojas-Briales E. 2015. Analysis of Mass Media News on Forest Issues: A Case Study of Spain. *Forest Systems* 24(2): 1-11. <https://doi.org/10.5424/fs/2015242-06381>.
- Farid AM, Fahreza FA, Prasetyo DPC, Firmansyah SH. 2022. Perhutanan Sosial sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan* 7(1): 130-149. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>.
- Goggin ML, Bowman A, Lester J, O'Toole L. 1990. Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. Scotts Foresman & Co. Illinois.
- Hamzah H, Suharjito D, Istomo I. 2016. Efektifitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 2(2): 116-128.
- Handityasa O, Purnaweni H. 2017. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok Terkait Perda Kab.Sleman No.18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *JPPMR* 6(2): 80-87. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15596>.
- Holsti OR. 1969. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, MA. Addison-Wesley.
- Ibisono RAA, Kartodihardjo H. 2019. Kelembagaan Hutan Rakyat Studi Kasus Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Bogor. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 4(3): 226-238.
- Iman MN, Arifin M. 2024. Dampak Perhutanan Sosial terhadap Perubahan Sosial Ekonomi di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pembangunan Sosial* 12(4): 16-28.
- Inama, Suharjito D, Trison S. 2024. Strategi Penghidupan Kelompok Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(3): 192-201. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v11i3.57642>.
- Kasmad R. 2013. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara. Makassar.
- Krumland D. 2004. Beitrag der Medien Zum Politischen Erfolg: Forstwirtschaft und Naturschutz im Politiffeld Wald. Peter Lang. Frankfurt.
- Lenggawa VA. 2019. Strategi Jawa Pos dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Media di Era Revolusi Industri 4.0. *Konvergensi* 1(1): 19-38.
- Lubis MI, Muntasib EKSH, Soekmadi R. 2023. Mekanisme Hubungan Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata Tangkahan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 10(2): 112-124. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i2.44309>.
- Ma Z, Hu C, Huang J, Li T, Lei J. 2022. Forests and Forestry in Support of Sustainable Development Goals (SDGs): A Bibliometric Analysis. *Forests* 13(11): 1-18. <https://doi.org/10.3390/f13111960>.
- Martapani AN, Fauzi H, Naparin M. 2021. Dampak Hutan Kemasyarakatan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus: Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. *Jurnal Rimba Lestari* 1(1): 35-46. <https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v1i1.387>.

- Mazmanian DA, Sabatier PA. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman. Minnesota.
- Nurdina IF, Kustanti A, Hilmanto R. 2015. Motivasi Petani dalam Mengelola Hutan Rakyat di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari* 3(3): 51-62. <https://doi.org/10.23960/jsl3351-62>.
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekayani M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan: Teori dan Implementasi*. IPB Press. Bogor.
- Nurysyifa F, Kaswanto RL. 2021. Kelembagaan Program Citarum Harum dalam Pengelolaan Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 8(3): 121-135. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i3.28064>.
- Paramita A, Sundawati L, Nurrochmat DR. 2017. Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Zona Tradisional Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 4(1): 1-12. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20075>.
- Pau C, Martin M, Vaduva R. 2022. Good Governance and Sustainable Development-The New Paradigm. *Robotica & Management* 27(1): 49-52. <https://doi.org/10.24193/rm.2022.1.10>.
- Permatasari D, Fauzi H, Effendi M. 2020. Dampak Perhutanan Sosial terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scientiae* 3(6): 1011-1019. <https://doi.org/10.20527/jss.v3i6.4716>.
- Pramono J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Dalam Sutoyo (Ed). UNISRI Press. Surakarta.
- Rachmawan D, Seda F, Siburian R. 2021. Melengkapi Analisa Teori Akses dengan Pendekatan Kolaboratif pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang. *Kawistara* 11(2):156-173. <https://doi.org/10.22146/kawistara.v11i2.65519>.
- Ragandhi A. 2021. Synergy Development of "State-Representative Apparatus" in Accelerating Social Forestry Policy Outcomes in Ngawi Regency, East Java. *Cakrawala* 15(2):109-123. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.374>.
- Ramadhan AM. 2023. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Pulau Sumatera. *Determinasi Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 1(2): 1-12. <https://doi.org/10.23917/determinasi.v1i2.40>.
- Reyes MC, Flores J, Fernandez C. 2024. Community-Based Forest Management: Challenges and Opportunities in Tropical Asia. *Journal of Selvicoltura ASEAN* 1(5): 218-228. <https://doi.org/10.70177/jsa.v1i5.1668>.
- Sa'diyah M, Soetarto E. 2021. Respons Masyarakat Desa Hutan Pasca Penetapan Perhutanan Sosial (Kasus: Kawasan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 5(2): 220-232. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.705>.
- Saputri IM, Fatimah IS, Kaswanto RL. 2025. Kajian Preferensi *Stakeholders* terhadap Bangunan Hijau di Lanskap Perkotaan Berbasis *Social Media Data* (SMD). *Jurnal Lanskap Indonesia* 17(1): 56-64. <https://doi.org/10.29244/jli.v17i1.56463>.
- Shepherd G, Warner K, Hogarth N. 2020. Forests and Poverty: How Has Our Understanding of The Relationship Been Changed By Experience. *International Forestry Review* 22(1): 29-43. <https://doi.org/10.1505/146554820829523907>.
- Situmorang MTN, Noviana L. 2022. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. 2(2): 68-75. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.68>.
- Tahir A. 2019. *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. UNG Press. Gorontalo.
- van Dijk TA. 2015. *The Handbook of Discourse Analysis*. John Wiley & Sons Inc. New Jersey.
- Wulandari C, Kaskoyo H, Febryano IG, Safe'I R, Bakri S, Yuwono SB. 2016. *Provokasi Arsitektur Pemikiran Konsep dan Strategi Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Plantaxia. Yogyakarta.